



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
DAN
PT PLN (PERSERO) UP3 MANOKWARI
TENTANG
MAGANG MBKM

NOMOR: 19.5.115/UN32.4/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal 19 (sembilan belas), bulan Mei tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nelman Dwiardo Horansil**, Assistant Manager Niaga dan Pemasaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UP3 Manokwari, berkedudukan di Jl. Bandung No. 2, Borarsi, Padarni, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perseroan Terbatas Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang Kelistrikan Negara dan merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program Magang MBKM** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat MBKM) adalah program magang institusi luar universitas yang diikuti oleh mahasiswa sebagai salah satu kegiatan dalam kurikulum MBKM
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program *Magang MBKM* secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) *Kegiatan Program Magang MBKM*; dan
- (2) *Kegiatan lain yang disepakati para pihak.*;

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang *Magang MBKM*

PASAL 4
KEWAJIBAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk:

- (1) Memfasilitasi kegiatan program Magang MBKM sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Memfasilitas kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Magang MBKM ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 4 (empat) bulan, mulai 20 Januari 2025 sampai dengan 06 Juni 2025 disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

M

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan)

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *kegiatan Magang MBKM* kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** menawarkan *kegiatan Magang MBKM* kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KESATU**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *kegiatan Magang MBKM*; dan
- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

✍

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Bandung No.2, Borarsi, Kabupaten Manokwari
Telepon : 986123
Surel : plnup3manokwari@gmail.com / up3manokwari@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.


PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Assistant Manager Niaga dan Pemasaran
PT. PLN (Persero) UP3 Manokwari

Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.
NIP.197003192005011001


Nelman Dwihardo Horansil
NIP.8714008ZY

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
